



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGOLAHAN KELAPA MENJADI *VIRGIN COCONUT OIL* DI NAGARI SUNUR, KECAMATAN NAN SABARIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

EMPOWERMENT OF WOMEN IN COCONUT PROCESSING INTO VIRGIN COCONUT OIL IN NAGARI SUNUR, NAN SABARIS DISTRICT, PADANG PARIAMAN REGENCY

Jusmita^{1,*}, Aldri Frinaldi²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

²Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: jusmita0212@gmail.com

Abstract

This study describe the empowerment carried out to women in Nagari Sunur in processing coconut as one of the potential areas to improve community welfare and increase income. Women's empowerment is carried out by various elements, be it the local government, community institutions and the Nagari community. With the abundant coconut potential of Nagari Sunur, as well as support from various parties, it is hoped that the empowerment efforts carried out can run properly. So that people can also enjoy the results of their work. The empowerment that has been carried out has shown good results in improving the welfare of the community. However, it is undeniable that in this effort there are still obstacles that have an impact on bottlenecks in product marketing. It is hoped that the Regional Government will support this activity more so that it can motivate the community to continue producing VCO oil processed products and also so that the community is able to be creative and independent.

Keywords: *Empowerment, Women, Processing, VCO*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan pemberdayaan yang dilakukan kepada perempuan di Nagari Sunur dalam mengolah kelapa sebagai salah satu potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah penghasilan. Pemberdayaan perempuan dilakukan oleh berbagai elemen, baik itu Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat dan masyarakat Nagari. Dengan adanya potensi kelapa melimpah yang dimiliki Nagari Sunur, serta dukungan dari berbagai pihak diharapkan upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasil kerjanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya, adapun pemberdayaan yang telah dilakukan, sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam upaya tersebut masih terdapat kendala yang berdampak terhadap keterhambatan dalam pemasaran produk. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung lebih kegiatan ini sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk terus memproduksi produk olahan minyak VCO dan juga agar masyarakat mampu untuk berkreasi dan mandiri.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Perempuan, Pengolahan, VCO*

PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman terkenal dengan daerah penghasil kelapa yang merupakan komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Kabupaten Padang Pariaman yang tersebar hampir diseluruh wilayah serta merupakan tanaman terluas yang mempunyai mutu terbaik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini ditandai dengan masih mendominasinya permintaan kelapa di pasar-pasar baik dalam daerah maupun luar daerah. Namun daya jualnya tidak terlalu menguntungkan, maka diperlukan inovasi untuk menciptakan produk agar dapat meningkatkan nilai jual kelapa tersebut. Sehingga muncul gagasan untuk membuat *VCO* dengan produsennya adalah kaum perempuan di Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris. Sasaran untuk pengolahan *VCO* ini diberikan kepada kaum perempuan yang ada di Nagari Sunur karena harapannya para perempuan bisa mandiri.

Namun, program yang dicanangkan pemerintah ini masih memiliki beberapa kendala yang membuatnya belum berjalan secara sempurna diantaranya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam mendukung program pemerintah, pola pikir masyarakat yang belum terbuka menerima masukan, keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, belum mampu menciptakan produk berskala besar karena alat produksi masih manual, pengemasan produk yang sederhana, belum ada izin BPOM sehingga akan sulit untuk dipasarkan dan promosi yang dilakukan masih sangat terbatas

Fokus terkait pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Adapun lokus penelitian adalah Kantor Wali Nagari Sunur dengan lokasinya yaitu, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut adalah beberapa landasan teori baik dari sisi normatif maupun dari teoritis. Dari sisi normatif terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum; pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif.

Pemerintah juga menjamin kesejahteraan sosial masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang lemah agar mampu untuk mempertahankan hidupnya, terdapat pada pasal 34 ayat (2) bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sikap pemerintah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dimana dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, untuk memberdayakan, perempuan dan laki-laki perlu kerja sama sebagai mitra kerja setara dan memberi inspirasi kepada suatu generasi baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian (Priyono, 198-229).

Selain itu dijelaskan pula bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, baik dalam haknya dalam bernegara, mencapai kedudukan ataupun nantinya laki-laki dan

perempuan sebagai mitra kerja. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan karena negara sudah menetapkan kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. Baik dia laki-laki ataupun perempuan.

Selanjutnya landasan teoritis dapat dijabarkan menjadi pemberdayaan perempuan, pengolahan dan *VCO* sebagai berikut: Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood, 1990). Keberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan individu dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan diperolehnya kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. (Sumodiningrat, 1997)

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan.

Pemberdayaan perempuan disini dimaksudkan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada para perempuan agar mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mampu untuk hidup mandiri sehingga para perempuan tidak harus selalu bergantung kepada laki-laki. Karena pasti akan ada masanya dimana perempuan itu harus berdiri diatas kakinya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Menurut Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah :

1. meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini,
2. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan,
3. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri,
4. meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha *home industry*. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah tersebut yaitu :

1. membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan,
2. membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk,

3. memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha,
4. mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal,
5. membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.

Menurut Hidajadi (Jurnal Perempuan edisi 17, 2001: 9), “Stereotip perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya” (Frinaldi, 2012). Dalam pemberdayaan perempuan, program pembuatan VCO ini sangat cocok untuk kaum hawa karena butuh keterampilan perempuan dalam mengolah minyak kelapa tersebut menjadi VCO.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Nugroho (2008:165-166) adalah :

1. penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol,
2. peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat,
3. pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program

pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

4. peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan,
5. peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, manajemen usaha serta mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Maulana (2009:46) menyebutkan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan produktivitas perempuan adalah:

1. pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan atau kelompok,
2. program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok,
3. pengembangan kelembagaan keuangan mikro di tingkat lokal,
4. penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif,
5. pengembangan usaha yang berkesinambungan,
6. pelibatan keluarga atau suami kelompok sasaran,
7. keterpaduan peran serta seluruh *stakeholders*,
8. penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha,
9. fasilitas bantuan, permodalan bersifat bergulir untuk pemupukan permodalan,
10. pemantapan serta pendampingan untuk kemandirian kelompok.

Frinaldi (2012) *Women in Development (WID)* tidak mampu menghilangkan masalah diskriminasi

terhadap wanita, sehingga muncul konsep baru *Gender and Development (GAD)* yang didasarkan atas asumsi bahwa kontraksi sosial yang dibuat atas peran wanita dan pria dapat diubah, misalnya peran ganda wanita harus juga menjadi kegiatan sehari-hari pria.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori *Gender and Development*, dimana teori ini tidak hanya menfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Selanjutnya adalah Pengolahan. Pengolahan berasal dari kata “olah” yang artinya cara (melakukan sesuatu) atau yang dilakukan untuk mencapai maksudnya. “Pengolahan adalah sebuah proses mengusahakan atau mengerjakan sesuatu (barang dan sebagainya) supaya menjadi lebih sempurna.” (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1988). Pengolahan berarti suatu cara yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih sempurna atau menjadi yang diinginkan.

Terakhir adalah *Virgin Coconut Oil (VCO)* yang merupakan asam lemak rantai menengah (MCFA) yang langsung dapat diserap melalui dinding usus tanpa mengalami proses hidrolisis dan enzimatis sehingga langsung dimetabolisme dalam hati untuk diproduksi menjadi energi (Sutarni, 2006:47). *Virgin Coconut Oil (VCO)* atau minyak kelapa murni mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah penimbunan dalam tubuh yang mengandung tokoferol dan betakaroten yang berfungsi mencegah penuaan dini, menjaga vitalitas tubuh, mencegah kanker dan HIV (Setiaji dan Prayugo, 2006).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui tingkatan kemajuan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pengolahan kelapa di Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari program Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perempuan di Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam program pemberdayaan perempuan di Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

METODE

Desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada metode pendekatan kualitatif, dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam kualitatif. Dalam kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas (Sugiyono, 2017:8).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait. Selain itu akan dilakukan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian, serta dengan dokumentasi yaitu berupa berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dari Perspektif Normatif

Untuk memberikan pengetahuan keterampilan pada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk sebuah lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yaitu Pusat Keterampilan Belajar Masyarakat (PKBM) IMANULLAH.

Dasar pembentukan lembaga ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan

sepanjang hayat”. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat diluar pendidikan formal yaitu dapat berupa pelatihan-pelatihan yang dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang nantinya apabila telah lulus akan diberikan sertifikat tanda kelulusan bagi peserta pelatihan.

PKBM adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, sejahtera, mandiri dan selalu mengembangkan diri secara positif dan hidup harmonis.

Pelaksanaan pemberdayaan ini dilihat dari potensi yang memungkinkan yang ada di Nagari Sunur yaitu kelapa. Maka perlu dilaksanakan pendidikan nonformal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang awalnya tidak memiliki keahlian dan ketidakmampuan menjadi mampu untuk mengolah, menciptakan produk dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Walaupun kebijakan khusus dari wali nagari belum ada untuk hal ini, tapi wali nagari sangat mendukung akan setiap kegiatan tersebut.

Analisis Dari Perspektif Teoritis

1. Pelaksanaan Program

Suatu daerah akan maju apabila masyarakatnya berdaya dan mampu untuk mandiri. Inilah yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan mengajarkan ilmu pengetahuan yang menujung keterampilan sehingga dapat berwirausaha dengan harapan

masyarakatnya dapat maju dan berkembang sehingga mampu menciptakan pemasukan sendiri dan mampu untuk membuka lapangan kerja lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya.

Nagari Sunur memiliki program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dimana telah dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memfasilitasi berjalannya kegiatan tersebut yang telah mendapat izin operasional serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Yang mana potensi unggulannya akan dikembangkan menjadi usaha untuk masyarakat setempat.

Kegiatan ini membutuhkan peserta dan partisipasi dari masyarakat. Cara perekrutan yaitu:

- a. Melakukan pendataan ke kantor Sosnakertran untuk mendapat angka pengangguran dan pencari kerja atau keluarga miskin yang membutuhkan
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Petugas Penanggulangan Kemiskinan Lapangan (P2KL) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat
- c. Melaporkan dan sekaligus konsultasi dengan Wali Nagari

Setelah dilakukan kegiatan tersebut maka didapatkanlah peserta sebanyak yang semuanya adalah perempuan yang mana kegiatan ini diadakan setiap tahunnya dengan kisaran peserta 20-35 orang.

PKBM sendiri juga sudah membentuk tim khusus yang akan menjadi tenaga pendidik yang terdiri dari dua orang yaitu pengusaha dan pengolah produk kelapa (santan kelapa dan briket) dan ketua kelompok dan pengumpul hasil olahan

produk kelapa yang merupakan anggota LSM P2KL Kabupaten Padang Pariaman.

Peserta diberikan kurikulum pembelajaran dan sertifikat tanda lulus pelatihan. Materi yang diajarkan yaitu:

- a. Pengetahuan dasar tentang produk turunan kelapa
- b. Kelapa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Prospek kelapa dalam perekonomian kerakyatan
- d. Peranan tanaman kelapa dan manfaatnya dalam kehidupan
- e. Pengolahan produk kelapa berupa VCO dan minyak tanak

Proses pembelajaran berupa ceramah seperti pengajaran di kelas dan praktek langsung pengolahan santan kelapa yang dilakukan secara berkelompok lalu dilakukan evaluasi hasil pembelajaran.

Setelah pelatihan berakhir maka akan dibentuk kelompok yang akan mengembangkannya menjadi usaha rumah tangga yang nantinya akan dibantu dengan sarana dari PKBM, arahan dorongan, dan motivasi serta mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul. PKBM akan bekerja sama dengan instansi organisasi/lembaga mitra lainnya dalam kegiatan tersebut.

Hal ini senada dengan Sumodiningrat (2002), pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Maksudnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan yang diperlukan adalah dorongan, motivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Artinya, tidak ada manusia yang sama

sekali tidak berdaya karena jika demikian pasti manusia akan punah.

Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah nyata, penyediaan masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Semikian pula pembaharuan institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan yang harus dilakukan adalah mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang lebih kuat. Dapat pula dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan tujuan akhirnya bukan masyarakat tergantung pada pemerintah tapi memandirikan masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung kegiatan ini adalah ketersediaan bahan baku berupa kelapa yang mudah didapatkan. Selain itu

dukungan penuh dari Wali Nagari terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada PKBM untuk terus meningkatkan kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat yang menjadi kendala bagi PKBM dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Keterbatasan dana bantuan yang diberikan pemerintah, karena untuk mendapatkan bantuan dana haruslah bersaing dengan proposal yang diberikan dengan kegiatan yang lainnya.
- b. Belum adanya izin resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk olahan produk kelapa, karena untuk mendapatkan izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) haruslah diperlukan bangunan yang layak, lingkungan yang bersih serta kualitas produk yang baik serta berbayar.
- c. Kesulitan dalam pemasaran hasil produksi, yang disebabkan belum adanya izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena kebanyakan masyarakat ini hanya mau yang gampang saja. Mereka merasa kegiatan ini membuang-buang waktu. Penyebab masyarakat jadi malas adalah karena hambatan-hambatan tersebut.
- e. *Virgin Coconut Oil (VCO)* akan berhasil apabila saat fermentasi udara cerah dan suhu stabil, tetapi terkadang saat dilakukannya fermentasi dalam kondisi hujan dan lembab.

Hambatan yang satu dengan yang lain saling terhubung, jika pemerintah telah memberikan anggaran dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pezininan untuk pembuatan produk minyak *Virgin Coconut Oil / VCO* ini tentu akan

berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat memasarkannya ke toko-toko maupun ke luar daerah. Akibatnya masyarakat mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan *Virgin Coconut Oil / VCO* tersebut. Karena adanya pemasukan, maka masyarakat tidak akan malas lagi untuk melakukan kegiatan pelatihan karena mereka sudah merasakan manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari pelatihan tersebut.

Selain itu kemasan yang digunakan sudah cukup baik dan dalam pengemasan sudah menggunakan alat bantu walaupun belum canggih namun bisa membantu dalam pengemasan produk agar lebih mudah.

3. Tindakan yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul pemerintah telah memberikan solusi agar kegiatan ini tetap berjalan, diantaranya:

- a. Memberikan bantuan berupa alat-alat produksi kepada PKBM
- b. Pemasaran produk melalui pameran dan jambore sebagai alternatif yang bertujuan untuk mengenalkan hasil karya masyarakat kepada pihak luar
- c. Memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk memotivasi masyarakat agar mau mengikuti kegiatan ini, dana berupa uang transportasi, uang makan dan beberapa perlengkapan untuk membuat produk.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hambatan yang terjadi ini senada dengan IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009:5), yaitu, membantu

mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri melalui pelatihan, membantu dalam strategi usaha dan pemasaran produk, memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan terkait legalitas dunia usaha, mendorong untuk mampu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro/foru pelatihan usaha.



Gambar 1. Produk VCO dan Minyak Tanak
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017

KESIMPULAN

Nagari Sunur memiliki sumber daya alam berlimpah berupa kelapa dan tanaman lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dilaksanakanlah pelatihan oleh Pemerintah daerah Dinsos PPPA yang didukung penuh oleh Wali Nagari Sunur. Namun, kekurangan dana membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu perizinan dari BPOM terkait pemasaran produk yang masih belum jelas dan produksi barang pertahun yang tidak jelas dan sangat sedikit karena produk akan dibuat jika ada yang memesan. Melihat permasalahan yang ada maka penulis menyarankan untuk perlunya tambahan dana

untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan menambah kegiatan pelatihan, Pemerintah Daerah menyiapkan dana permodalan agar bisa didistribusikan kepada tiap-tiap Nagari sehingga tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan dana atau memberdayakan Bank Daerah (Bank Nagari) untuk melakukan peminjaman modal. Pemerintah daerah perlu untuk mempercepat perizinan untuk pemasaran produk komersial sehingga *Virgin Coconut Oil / VCO* bisa menjadi icon Nagari Sunur yang berdampak pada semangat masyarakat dalam memproduksi *Virgin Coconut Oil / VCO*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Delly, Maulana. 2009. Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kondisi Ekonomi Kaum Perempuan Miskin (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon). *Skripsi. Ilmu Administrasi Negara*. Fisipol. UGM.
- Frinaldi, Aldri. 2012. *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Yang Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. UNP
- Kartasasmita, Ginanjar (1995), *“Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi”*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei 1995.
- Novian, Budhy. 2010. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang. Kepulauan Bangka Belitung.

Buku/Disertasi

- Ambar, Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anonim. 2006. *Konsep pengembangan kelapa terpadu*. Bogor: Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka
- Prayugo, P dan Setiaji, B. (2006). *Membuat VCO Berkualitas Tinggi*. Cetakan I. Jakarta: Penebar Swadaya
- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint.
- Roosganda, Elizabeth. 2007. *Pemberdayaan Wanita Mendukung Startegi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan*. Forum penelitian Agro Ekonomi. Vol 25 No. 2: Hal 131.
- Soetomo. 2010. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sumodinigrat, Gunawan. 2002.
*Memberdayakan Masyarakat
Perencana Kencana.* Nusadwina:
Jakarta.

Sutarmi.2006. *Taklukan Penyakit dengan
VCO.*Jakarta: Penebar Swadaya

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah